STUDI LAYANAN ADMINISTRASI PENERBITAN SURAT PERSETUJUAN BERLAYAR DI SYAHBANDAR PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PEKALONGAN JAWA TENGAH

TUGAS AKHIR

OLEH:

SISKA

1522020183

JURUSAN PENANGKAPAN IKAN

POLITEKNIK PERTANIAN NEGERI PANGKEP

2018

HALAMAN PENGESAHAN

STUDI LAYANAN ADMINISTRASI PENERBITAN SURAT PERSETUJUAN BERLAYAR DI SYAHBANDAR PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PEKALONGAN JAWA TENGAH

OLEH:

SISKA

1522020183

Tugas Akhir ini sebagai Syarat untuk Menyelesaikan Studi Pada Jurusan Penangkapan ikan Politeknik Pertanian Negeri Pangkep

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh:

Pembimbing I	Pembimbing II
Paharuddin,ST.,M.Si	**Ir. Syamsul Hadi, M.Si**
NIP.197105292005011001	**NIP.119620319198903100 1**

Mengetahui,

Direktur	Ketua Jurusan
Dr. Ir. H. Darmawan, M.P	**Salman,S.Pi.,M.Si**
NIP. 196702021998031002	**NIP.196812311995121001**

HALAMAN PERSETUJUAN PENGUJI

Judul :Studi Layanan Administrasi Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar di Syahbandar PelabuhanPerikanan Nusantara PekalonganJawa Tengah

Nama :Siska

Nim :1522020183

Jurusan :Penangkapan Ikan

Menyetujui,

Tim Penguji

1. **Paharuddin,ST.,M.Si** ( )
2. **Ir.Syamsul Hadi,M.Si** ( )
3. **Husniati,S.Pi.,M.Si** ( )
4. **Andi Imran Anshari, S.Pi.,M.Si** ( )

Mengetahui,

Ketua Jurusan

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
POLITEKNIK PERTANIAN NEGERI PANGKEP
JURUSAN PENANGKAPAN IKAN

Salman,S.Pi.,M.Si

NIP. 196812311995121001

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa tugas akhir ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dalam daftar pustaka.

Pangkep, Oktober 2018

Yang menyatakan,

Siska

KATA PENGANTAR



Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, Sang Maha Agung yang telah memberikan setitik ilmuNya serta nikmat yang tak terhingga sehingga penulis diberikan ruang dan waktu untuk menyelesaikan Tugas Akhir ini, tahun akademik 2018 ini dapat terwujud. Serta shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah mengatur kita kepada zaman modernisasi ini dalam menggapai tujuan dan nilai-nilai kemanusiaan yang bermartabat dan moralitas dalam menjalani kehidupan sehari-hari, khususnya dalam mengarungi dunia pendidikan. Penulis mengucapkan terimah kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua Orang Tua Ayahanda Arifuddin dan Ibunda Sano beserta seluruh keluarga yang telah banyak membantu penulis baik moril, motivasi dan iringan doa sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Seminar Tugas Akhir ini.

Tugas Akhir ini sebagai Syarat untuk Menyelesaikan Studi Pada Jurusan Penangkapan ikan Politeknik Pertanian pada Program Studi Penangkapan Ikan, Politeknik Pertanian Negeri Pangkep**.**

Ucapan terimah kasih yang tak terhingga Penulis khaturkan kepada :

1. Dr. Ir. H.Darmawan, M.P selaku Direktur Politeknik Pertanian Negeri Pangkep
2. Bapak Salman, S.Pi., M.Si selaku Ketua Jurusan Penangkapan Ikan

3. Bapak Paharuddin, ST., M.Si selaku Dosen Pembimbing Pertama dan Bapak Ir. Syamsul hadi., M.Si Dosen Pembimbing kedua yang telah membimbing penulis sehingga dapat menyelesaikan laporan rekapitulasi Pengalaman Kerja Praktik Mahasiswa (PKPM) ini.

4. Bapak Motch. Tekad Agung, A.Pi, MM selaku pembimbing lapangan yang telah membimbing kami selama dilokasi PKPM.

5. Bapak/Ibu Dosen Serta Pegawai Dan Teknisi Jurusan Penangkapan Ikan

6.Sahabat-sahabat serta teman-teman dari Jurusan Penangkapan Ikan Angkatan XXVIII.

Penulis menyadari dengan selesainya Tugas Akhir ini mungkin terdapat kekurangan. Oleh karena itu,kritik dan saran yang sifatnya menyempurnakan laporan ini penulis harapkan dengan senang hati.

Akhir kata semoga laporan ini dapat bermamfaat bagi semua pihak

Pangkep, Oktober 2018

Penulis

\

DAFTAR ISI

No Teks Halaman

HALAMAN JUDUL i

HALAMAN PENGESAHAN ii

HALAMAN PERSETUJUAN iii

HALAMAN PERNYATAAN iv

KATA PENGANTAR v

DAFTAR ISI vii

DAFTAR TABEL x

DAFTAR GAMBAR xi

DAFTAR LAMPIRAN xii

ABSTRAK xiii

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Tujuan dan Kegunaan 3

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Definisi Pelabuhan Perikanan 4

2.2 Fungsi dan Tujuan Pembangunan Pelabuhan 4

2.2.1 Fungsi Pelabuhan Perikanan 4

2.2.2 Tujuan Pembangunan Pelabuhan 5

2.3 Klasifikasi Pelabuhan Perikanan 6

2.3.1 Pelabuhan Perikanan Samudra 6

2.3.2 Pelabuhan Perikanan Nusantara 6
2.3.3 Pelabuhan Perikanan Pantai 7
2.3.4 Pelabuhan Pendaratan ikan 7
2.4 Fasilitas Pelabuhan Perikanan 8
2.4.1 Fasilitas Pokok 8
2.4.2 Fasilitas Fungsional 8
2.4.3 Fasilitas Penunjang 10
2.5 Operasional Syahbandar 11
2.6 Pelayanan Pelabuhan Perikanan 12
2.7 Pengertian Administrasi 13
2.8 Pengertian SPB 14
BAB III METODOLOGI
3.1 Waktu dan Tempat 15
3.2 Metode Pengambilan Data 15
BAB IV KEADAAN UMUM
4.1 Keadaan umum PPN Pekalongan 16
4.2 Struktur Organisasi 18
4.3 Tugas dan Fungsi PPN Organisasi 19
4.4 Kedudukan, Tugas dan Fungsi PPN Pekalongan 20
4.5 Sarana dan Prasarana 23

BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN

5.2 Pengurusan Surat Persetujuan Berlayar 24

5.2 Penundaan Keberangkatan 29

5.3 Pembebasan SPB 29

5.4 Realisasi Penerbitan SPB 30

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan 32

6.2 Saran 32

DAFTAR PUSTAKA 33

LAMPIRAN 35

RIWAYAT HIDUP 46

DAFTAR TABEL

No Teks Halaman

1.Realisasi Penerbitan SPB 30

DAFTAR GAMBAR

No Teks Halaman

1. Peta Lokasi PPN Pekalongan 16

2. Struktur Organisasi PPN Pekalongan 18

3. SOP Pelayanan Penerbitan SPB 28

4. Grafik Realisasi Penerbitan SPB 31

DAFTAR LAMPIRAN

No Teks Halaman

1. Failitas Pokok PPN Pekalongan.....35

2. Fasilitas Fungsional.....36

3. Fasilitas Penunjang 38

4. Lokasi PPN Pekalongan.....39

5. Sarana dan Prasarana.....40

6. Jenis-Jenis Dokumen.....42

ABSTRAK

SISKA, 1522020183 Studi Layanan Administrasi Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar di Syahbandar Pelabuhan Perikanan Nusantara Pekalongan Jawa Tengah Dibawah bimbingan PAHARUDDIN dan SYAMSU HADI

Pelabuhan Perikanan merupakan tempat bertemunya berbagai pelaku yang terkait dengan perikanan tangkap yang memiliki kepentingan masing-masing sehingga terwujud berbagai aktifitas perikanan di pelabuhan tersebut. Aktifitas tersebut meliputi bertambat dan berlabuhnya kapal, mengisi bahan perbekalan melaut, mendaratkan dan menjual hasil tangkapan, pembuatan kapal, perbaikan kapal, perbaikan alat tangkap, perbaikan mesin, pendistribusian hasil tangkapan, pengolahan, pelelangan, penjualan solar, penjualan air, pembuatan es dan lainnya. (Yasa. A. 2012).

Tugas Akhir ini bertujuan untuk mendekspresikan tentang Studi Layanan Administrasi Penerbitan Surat Persetujun Berlayar di Syahbandar Pelabuhan Perikanan Nusantara Pekalongan, dan kegunaan dari Tugas Akhir ini semoga dapat menambah pengetahuan dan wawasan khususnya bagi penulis dan mahasiswa pada umumnya mendekspresikan prosedur pelayanan penerbitan SPB.

Data Tugas Akhir ini dilaksanakan kurang lebih 3 bulan. Terhitung sejak tanggal 29 Januari sampai 20 April 2018, di PPN Pekalongan Jawa Tengah.

Metode pengumpulan data yaitu data primer melalui *interview* atau wawancara langsung terhadap pembimbing lapangan dan mengamati secara langsung di lokasi. Data sekunder diperoleh dari Intansi terkait dan studi *LIterature* dari berbagai buku yang relevan dengan pembahasan Tugas Akhir.

PPN Pekalongan adalah suatu Pelabuhan Perikanan tipe B di Indonesia yang memiliki peranan dalam melayani para nelayan dalam melakukan pelayanan administrasi dan melakukan produksi serta panen hasil perikanan.

Prosedur Pelayanan Penerbitan SPB di Syahbandar Pelabuhan Perikanan Nusantara Pekalongan Jawa Tengah dimulai dari pengajuan permohonan penerbitan SPB dan Penyerahan Dokumen Administrasi ke Syahbandar, dan setelah itu dlakukanlah :a. Pemeriksaan Administratif, Pemeriksaan Teknis dan Nautis, dan selanjutnya Penerbitan SPB

Kata Kunci : Pelabuhan Perikanan, Pelayanan Administrasi, Penerbitan SPB

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Indonesia termasuk salah satu Negara Bahari sekaligus Negara Kepulauan terbesar di dunia. Luas perairannya mencapai sekitar 5,8 juta km atau 75% dari total luas wilayahnya. Wilayah perairan ini terbesar dalam bentuk pulau, berjumlah sekitar 17.506 pulau yang dikelilingi oleh 81.000 km garis pantai. Dengan luas perairan yang mencapai 5,8 juta km tersebut indonesia memiliki kelimpahan sumberdaya kelautan dan perikanan dengan sejumlah keunggulan komperatif yang sangat tinggi Firman (2009).

Negara Indonesia merupakan kepulauan yang memiliki potensi perikanan laut yang cukup besar yang dapat memberikan pendapatan atau devisa. Pembangunan sektor perikanan terutama diarahkan untuk meningkatkan produksi dan produktivitas, memperluas kesempatan kerja, meningkatkan taraf hidup kesejahtraan nelayan serta menambah penyediaan protein hewani bagi kebutuhan masyarakat. Produksi perikanan dapat ditingkatkan melalui pembangunan perikanan yang harus menyediakan fasilitas-fasilitas dan fasilitas yang ada di Pelabuhan Perikanan sendiri digolongkan dalam 3 kelompok yaitu fasilitas pokok, fasilitas funggsional, fasilitas penunjang serta pengembangan pelayanan yang berbasis *Online* di Pelabuhan perikanan tersebut.

Pelabuhan Perikanan merupakan tempat bertemunya berbagai pelaku yang terkait dengan perikanan tangkap yang memiliki kepentingan masing-masing

sehingga terwujud berbagai aktifitas perikanan di pelabuhan tersebut. Aktifitas tersebut meliputi bertambat dan berlabuhnya kapal, mengisi bahan perbekalan melaut, mendaratkan dan menjual hasil tangkapan, pembuatan kapal, perbaikan kapal, perbaikan alat tangkap, perbaikan mesin, pendistribusian hasil tangkapan, pengolahan, pelelangan, penjualan solar, penjualan air, pembuatan es dan lainnya. (Yasa. A. 2012)

Oleh karena itu untuk mendukung kegiatan pemanfaatan sumberdaya hayati tersebut maka perlu didirikan fasilitas pendaratan dan juga pengolahan baik berupa kegiatan administrasi ataupun pengawasan kegiatan operasional bidang perikanan di Pelabuhan Perikanan.

Pelabuhan Perikanan Nusantara Pekalongan adalah unit pelaksana teknis Departemen Kelautan dan Perikanan dibidang Prasarana Pelabuhan Perikanan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perikanan Tangkap, Pelabuhan Perikanan Nusantara Pekalongan merupakan Pelabuhan Perikanan yang diusahakan karena sebagian sarana dan prasarana yang produktif dan ekonomis dikelola oleh Perum Prasarana Perikanan Samudera Cabang Pekalongan.

Pelayanan pelabuhan perikanan merupakan suatu proses pelayanan jasa yang diberikan pihak pelabuhan perikanan dan pihak penyediaan jasa lainnya, diberikan untuk pengguna jasa Pelabuhan Perikanan (Nelayan, Pedagang bakul, Pengolah dan pengguna jasa Pelabuhan Perikanan lainnya).

Pelayanan pelabuhan perikanan :

- Tambat labuh kapal-kapal perikanan

- Bongkar muat kapal-kapal perikanan
- Administrasi kesyahbandaran pelayanan kapal-kapal perikanan
- Pembinaan dan peningkatkan kemampuan nelayan
- Layanan kebutuhan usaha penangkapan ikan.

Terwujudnya suatu pelayanan yang baik di suatu pelabuhan perikanan adalah hal yang sangat penting karena pelayanan merupakan salah satu kegiatan yang menentukan keberhasilan dalam pembangunan pelabuhan perikanan.

1.2 Tujuan dan kegunaan

Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan Tugas Akhir ini yaitu untuk mendekspresikan prosedur pelayanan administrasi penerbitan Surat Persetujuan Berlayar di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pekalongan.

Kegunaan dari tugas akhir ini semoga dapat menambah penggetahuan dan wawasan khususnya bagi penulis serta Mahasiswa pada umumnya dalam mendekspresikan prosedur pelayanan administrasi penerbitan Surat Persetujuan Berlayar.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Defenisi Pelabuhan Perikanan

Pelabuhan adalah daerah perairan yang terlindungi dari gelombang yang dilengkapi dengan fasilitas terminal laut yang meliputi dermaga tempat kapal dapat bertambat untuk melakukan bongkar muat barang dan sebagai tempat penyimpanan untuk menunggu keberangkatan berikutnya.

Pelabuhan perikanan tempat yang terdiri dari daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang dipergunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan. Pelabuhan adalah wilayah perpaduan antara wilayah daratan dan lautan yang dipergunakan sebagai pangkalan kegiatan penangkapan ikan, dilengkapi berbagai fasilitas sejak ikan didaratkan sampai akan didistribusikan (Lubis, 2006)

2.2. Fungsi dan Tujuan Pembangunan Pelabuhan Perikanan

2.2.1. Fungsi Pelabuhan Perikanan

Fungsi pelabuhan perikanan menurut pasal 41 UU No. 31 tahun 2004, yaitu :

1. Tempat tambat labuh kapal perikanan.
2. Tempat pendaratan ikan.s
3. Tempat pemasaran dan distribusi ikan.

4. Tempat pelaksanaan mutu hasil perikanan.
5. Tempat pengumpulan data tangkapan.
6. Tempat pelaksanaan penyuluhan serta pengembangan masyarakat perikanan.
7. Tempat untuk memperlancar kegiatan operasional kapal.

2.2.2. Tujuan Pembangunan Pelabuhan Perikanan

Tujuan atau makna yang melekat pada istilah pembangunan semuanya akan selalu menunjuk kepada sesuatu yang positif, artinya setiap pembangunan selalu diharapkan bermanfaat. Namun demikian, pada dasarnya kegiatan pembangunan pelabuhan termaksud pelabuhan perikanan yang telah dilakukan diharapkan dapat memberikan dampak secara fisik yang berupa ancaman terhadap kerusakan ekologi baik berupa kerusakan lahan, biologi, yang telah dilaksanakan terdapat pula dampak sosial maupun ekonomi, baik yang bersifat positif maupun negatif.

Pembangunan yang dilaksanakan pemerintah bertujuan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang sekaligus menunjang kehidupan ekonomi masyarakat; salah satunya adalah pembangunan pelabuhan seperti yang telah dilakukan di beberapa wilayah kabupaten. Pembangunan pelabuhan perikanan terutama berfungsi dalam pelayanan jasa dibidang perikanan termaksud docking, pengolahan ikan, sandar kapal dan pengadaan sarana penangkapan ikan (Direktorat Jenderal Perikanan, 1994).

2.3. Klasifikasi Pelabuhan Perikanan

Tipe dan kriteria pelabuhan perikanan berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. PER. 16/MEN/2006. Klasifikasi pelabuhan perikanan sebagai berikut :

2.3.1. Pelabuhan Perikanan Samudera (Tipe A)

a) Melayani kapal perikanan yang melakukan kegiatan perikanan di laut teritorial, Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, dan laut lepas;
b) Memiliki fasilitas tambat labuh untuk kapal perikanan berukuran kolam sekurang-kurangnya 60 GT;
c) Panjang dermaga sekurang-kurangnya 300 m, dengan kedalaman kolam sekurang-kurangnya minus 3 m;
d) Mampu menampung sekurang-kurangnya 100 kapal perikanan atau jumlah keseluruhan sekurang-kurangnya 6.000 GT kapal perikanan sekaligus;
e) Ikan yang didaratkan sebagian untuk tujuan ekspor

2.3.2. Pelabuhan Perikanan Nusantara (Tipe B)

a) Melayani kapal perikanan yang melakukan kegiatan perikanan di laut teritorial dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia;
b) Memiliki fasilitas tambat labuh untuk kapal perikanan berukuran sekurang-kurannya 60 GT;
c) Panjang dermaga sekurang-kurannya 300 m, dengan kedalaman kolam sekurang-kurannya minus 3 m;

d) Mampu menampung sekurang-kurangnya 75 kapal perikanan atau jumlah keseluruhan sekurang-kurangnya 2.250 GT kapal perikanan sekaligus;
e) Terdapat industri perikanan.

2.3.3. Pelabuhan Perikanan Pantai (Tipe C)

a) Melayani kapal perikanan yang melakukan kegiatan perikanan di perairan pedalaman, perairan kepulauan dan laut teritorial;
b) Memiliki fasilitas tambat labuh untuk kapal perikanan berukuran sekurang-kurangnya 10 GT;
c) Panjang dermaga sekurang-kurangnya 100-150 m, dengan kedalaman kolam sekurang-kurangnya minus 2 m;
d) Mampu menampung sekurang-kurangnya 30 kapal perikanan atau jumlah keseluruhan sekurang-kurangnya 300 GT kapal perikanan sekaligus.

2.3.4. Pangkalan Pendaratan Ikan (Tipe D)

a) Melayani kapal perikanan yang melakukan kegiatan perikanan di perairan pedalaman dan perairan kepulauan;
b) Memiliki fasilitas tambat labuh untuk kapal perikanan berukuran sekurang-kurangnya 3 GT;
c) Panjang dermaga sekurang-kurangnya 50-100 m, dengan kedalaman kolam sekurang-kurangnya minus 2 m;

d) Mampu manampung sekurang-kurangnya 20 kapal perikanan atau jumlah keseluruhan sekurang-kurangnya 60 GT kapal perikanan sekaligus.

2.4.Fasilitas Pelabuhan Perikanan

Menurut Lubis (2000) didalam melaksanakan fungsi dan peranannya, pelabuhan perikanan dilengkapi dengan berbagai fasilitas yang terdiri dari fasilitas pokok, fasilitas fungsional, dan fasilitas penunjang.

Adapun fasilitas yang ada di pelabuhan perikanan dan pangkalan pendaratan ikan antara lain;

2.4.1. Fasilitas Pokok

Fasilitas pokok adalah fasilitas dasar yang diperlukan dalam kegiatan disuatu pelabuhan. Fasilitas ini berfungsi untuk menjamin keamananan dan kelancaran kapal baik waktu berlayar, keluar masuk pelabuhan maupun sewaktu berlabuh di pelabuhan.

Fasilitas pokok terdiri dari :

a. Dermaga
b. Kolam Pelabuhan
c. Alat Navigasi
d. Bangunan penahan gelombang *(break water)*

2.4.2. Fasilitas Fungsional

Fasilitas fungsional adalah fasilitas yang berfungsi untuk meninggikan nilai guna dari fasilitas pokok sehingga dapat menunjang aktifitas pelabuhan

fasilitas ini disediakan sesuai dengan kebutuhan operasional pelabuhan perikanan tersebut.

Fasilitas fungsional terdiri dari:

a) Gedung Tempat Pelelangan Ikan (TPI)

Tempat Pelelangan Ikan (TPI) adalah pertemuan antara penjual (nelayan atau pemilik kapal) dengan pembeli pedagang atau agen perusahaan) untuk kegiatan melelang ikan. Letak dan pembagian ruang di gedung pelelangan ikan harus direncanakan agar aliran produk berjalan dengan cepat. Hal ini dengan pertimbangan karena produk perikanan merupakan produk yang cepat mengalami penurunan mutu sehingga apabila aliran produk terganggu maka akan menyebabkan terjadinya penurunan mutu (Lubis, 2000).

Ruangan yang ada di gedung pelelangan antara lain sebagai berikut (Lubis, 2000).

1. Ruang pelelangan yaitu tempat menimbang, mengukur ikan dan melelang ikan.
2. Ruang pengepakkan yaitu tempat memindahkan ikan ke peti lain dengan diberi es, garam dan lain-lain selanjutnya untuk dikirim.
3. Ruang administrasi pelelangan terdiri dari loket-loket gedung peralatan lelang, ruang duduk peserta lelang, toilet dan ruang cuci umum.

Luas gedung pelelangan ikan ditentukan oleh faktor-faktor sebagai berikut :

a. Jumlah produksi yang harus ditampung oleh gedung pelelangan.
b. Jenis ikan yang ditangkap.
c. Cara penempatan ikan.

b) Perbekalan.
c) Bangunan penyaluran BBM.
d) *Cold storage*
e) *Dock* atau *slipway*

Merupakan salah satu fasilitas fungsional yang berfungsi untuk memelihara atau memperbaiki kapal khususnya bagian lunas kapal.

f) Bengkel
g) Tempat penjemuran jaring.
h) Tempat istirahat nelayan.

2.4.3. Fasilitas Penunjang

Fasilitas penunjang adalah fasilitas yang secara tidak langsung meningkatkan peranan pelabuhan atau para pelaku mendapatkan kenyamanan melakukan aktifitas pelabuhan.

Fasilitas penunjang terdiri dari :

a. Kantor pengelola pelabuhan.
b. Kantor syahbandar.
c. Poliklinik.
d. Kantin.

2.5 Operasional Syahbandar

Keberadaan Syahbandar di pelabuhan perikanan merupakan perwujudan dari salah satu fungsi pemerintahan untuk keamanan dan keselamatan operasional kapal perikanan. Kapal perikanan dalam melakukan penangkapan atau pengangkutan tidak saja harus memenuhi standar teknis penangkapan/pengangkutan ikan tetapi juga secara internasional harus memenuhi standar keselamatan pelayaran. Keselamatan pelayaran adalah suatu keadaan terpenuhinya keselamatan dan keamanan yang menyangkut kapal perikanan di laut dan di pelabuhan perikanan.

Sebagai implementasi Undang–Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang Perikanan, dalam hal ini pasal 42 dalam rangka keselamatan operasional kapal perikanan, ditunjuk Syahbandar di Pelabuhan Perikanan. Yang merupakan pejabat pemerintah yang ditempatkan secara khusus di pelabuhan perikanan untuk pengurusan administratif dan menjalankan fungsi menjaga keselamatan pelayaran atau operasional kapal perikanan. Syahbandar tersebut diangkat oleh menteri yang membidangi urusan pelayaran.

Berdasarkan sumber data Kepala Subdit Pangkalan Pendaratan Ikan Direktorat Pelabuhan Perikanan DJPT tahun 2017, Indonesia memiliki pelabuhan perikanan yang aktif berjumlah 538 buah yang terdiri dari 7 Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS), 17 Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN), 34 Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) dan 480 Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI). Hingga saat ini, Syahbandar di pelabuhan perikanan telah ditempatkan pada 130 Pelabuhan Perikanan, yaitu 22 Pelabuhan Perikanan UPT Pusat dan 108 Pelabuhan

Perikanan UPT Daerah. Dalam rangka pelaksanaan tugas Syahbandar di Pelabuhan Perikanan mengacu kepada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 3/PERMEN-KP/2013 tentang Kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan. Setiap kapal penangkap dan pengangkut ikan harus mendaratkan ikannya di pelabuhan perikanan atau di pelabuhan pangkalan yang ditetapkan sesuai dengan Surat Izin Kapal Penangkap Ikan (SIPI) /Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI), untuk itu Syahbandar di pelabuhan perikanan akan memeriksa kapal yang masuk dan akan berlayar dari pelabuhan perikanan agar memenuhi persyaratan keselamatan pelayaran..

2.6 Pelayanan Pelabuhan Perikanan

Pelayanan pelabuhan perikanan merupakan suatu proses pelayanan jasa yang di berikan pihak pelabuhan perikanan dan pihak penyediaan jasa lainnya, diberikan untuk pengguna jasa pelabuhan perikanan (nelayan, pedagang bakul, pengolah dan pengguna jasa pelabuhan perikanan lainnya).

Pelayanan pelabuhan perikanan :

- Tambat labuh kapal-kapal perikanan
- Bongkar muat kapal-kapal perikanan
- Administrasi kesyahbandaran pelayanan kapal-kapal perikanan
- Pembinaan dan peningkatkan kemampuan nelayan
- Layanan kebutuhan usaha penangkapan ikan.

Terwujudnya suatu pelayanan yang baik di suatu pelabuhan perikanan adalah hal yang sangat penting karena pelayanan merupakan salah satu kegiatan yang menentukan keberhasilan dalam pembangunan pelabuhan perikanan.

Munurut Dibbs (1970) dalam Yulia (2005), fasilitas yang diperlukan di Pelabuhan Perikanan dibagi menjadi 2 bagian yang saling berkaitan yaitu :

1. Pelayanan untuk Kapal dan Alat Tangkap, dengan fasilitas terkait :
    a. Dermaga sebagai Fasilitas Bongkar Muat Hasil Tangkapan.
    b. Fasilitas BBM.
    c. Fasilitas es.
    d. Fasilitas Perbekalan kapal termaksud *slipway.*
    e. Areal yang mencukupi untuk perbaikan dan penyimpanan alat tangkap.
2. Pelayanan untuk penanganan hasil tangkapan dan semua aspek *marketing*, dengan fasilitas terkait yaitu :
    a. Fasilitas pemasaran.
    b. Pabrik es atau gudang es.
    c. Cold storage.
    d. Area Parkir

2.7 Pengertian Administrasi

Administrasi adalah seluruh proses kerja sama antara dua orang atau lebih dalam mencapai tujuan dengan memanfaatkan sarana dan prasarana tertentu secara berdaya guna dan berhasil guna.

Untuk memahami pengertian administrasi, banyak para ahli mengemukakan pengertian administrasi yang melihat dari berbagai sudut pandang, antara lain:

1. Administrasi adalah keseluruhan proses kerja sama antara dua orang atau lebih yang didasarkan atau rasionalitas tertentu, untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya Daryanto (2008)
2. Kedudukan dan ilmu organisasi mengatakan bahwa administrasi adalah segenap rangkaian kegiatan penataan pekerjaan pokok yang dilaksanakan oleh sekolompok orang dalam bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu

Jadi kata administrasi dapat diartikan sebagai suatu kegiatan atau usaha untuk membantu, melayani, mengarahkan atau mengatur semua kegiatan didalam mencapai suatu tujuan organisasi. Atau dengan kata lain, administrasi adalah aturan penyelenggaraan dan pelaksanaan organisasi dari sisi lahir untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien.

2.8 Pengertian SPB

SPB adalah dokumen negara yang dikeluarkan oleh Syahbandar di Pelabuhan Perikanan kepada setiap kapal perikanan yang akan berlayar meninggalkan Pelabuhan Perikanan setelah kapal perikanan memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal, laik tangkap, dan laik simpan. SPB berlaku satu kali trip operasional kegiatan perikanan.

BAB III

METODOLOGI

3.1 Waktu dan Tempat

Pengambilan data untuk kelengkapan Tugas Akhir dilaksanakan dari bulan Januari sampai April 2018, bertempat di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pekalongan, Jawa Tengah.

3.2 Metode Pengambilan Data

Metode pengambilan data dalam penyusunan Tugas Akhir di lakukan dengan cara :

1. Interview atau wawancara langsung dengan Pembimbing Lapangan.
2. Observasi atau pengamatan langsung dengan cara mengamati secara langsung kegiatan pelayanan administrasi penerbitan Surat Persetujuan Berlayar.
3. Pengumpulan data sekunder PPN Pekalongan.
4. Data sekunder melalui bahan-bahan literatur.